

## Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI

**Yuliasti Linawati**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
yuliastilinawati@gmail.com

**Herlina Suzantia**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
hersuzan@gmail.com

**Muhammad Ghafur Wibowo**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
muhammad.wibowo@uin-suka.ac.id

### Suggested Citation:

Linawati, Yuliasti; Suzantia, Herlina; Wibowo, Muhammad Ghafur. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 3, Nomor 2: pp 133-144. <https://dx.doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547>

### Article's History:

Received November 2020; Revised January 2021; Accepted March 2021.  
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract:

*This study aims to determine the relationship between good governance on economic growth and the human development index in OIC developing countries. This study uses a panel data regression approach with the best model, the random effect model (REM). The research period used is from 2005 to 2018. The results show that voice and accountability, political stability, regulatory quality, and the rule of law significantly affect economic growth. In contrast, only the rule of law variable substantially impacts the human development index model. This research also highlights the importance of the government in improving good governance to promote higher economic growth and human development.*

**Keywords:** good governance; economic growth; human development index; Muslim countries; political stability

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di negara berkembang OKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan metode terbaik yaitu random effect model (REM). Periode penelitian yang digunakan yaitu dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan supremasi hukum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada model indeks pembangunan manusia hanya variabel aturan hukum yang memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemerintah dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** pemerintahan yang baik; pertumbuhan ekonomi; indeks pembangunan manusia; negara muslim; stabilitas politik

## PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik merupakan elemen utama untuk pembangunan yang sejahtera di negara manapun, yang artinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih baik, keberadaan *good governance* sangat penting terutama di negara berkembang (Turner, 2011). Ahmad dan Saleem (2014), menemukan bahwa tata kelola berpengaruh signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa karya empiris yang lain juga telah menunjukkan adanya hubungan antara tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi (Awan et al., 2018; Samarasinghe, 2018; Oyinlola et al., 2020; dan Bah & Kpognon, 2020) maupun pembangunan manusia (Ahmad & Saleem, 2014; Keser & Gökmen, 2017; dan Chaudhry et al., 2009).

Hubungan yang kuat antara pemerintahan dan pembangunan manusia pertama kali dimasukkan ke dalam laporan resmi agenda United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 (Rangkuti, 2020). Setelah itu, selama dekade terakhir abad ke-20, kebutuhan akan tata pemerintahan yang baik telah berdampak dan menjadi tema yang berulang dalam literatur yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Masalah tata kelola yang baik dan dampaknya terhadap pembangunan adalah jantung dari semua perdebatan kebijakan di antara para pembuat kebijakan dan peneliti. Intervensi pemerintah atau kualitas pemerintahan menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencapaian pembangunan manusia yang tinggi. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat secara efisien menyampaikan sumber daya kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pradhan, 2011).

Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting dalam mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai suatu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara merupakan bagian dari keberhasilan kinerja pemerintah beserta lembaga dan instansi-instansinya (Fajar & Azhar, 2019). Salah satu syarat utama yang dibutuhkan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yaitu dengan cara mengendalikan tata kelola pemerintahan, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan baik di negara maju maupun berkembang (Waluyo, 2012).

Tujuan dari "*good governance*" adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, yang kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang. Tata pemerintahan yang baik menjadi penting karena di dalam tata kelola ini, individu dianggap lebih bahagia jika kehidupan masyarakat diatur oleh lembaga yang tidak memihak dan tidak bias, bijaksana, transparan, akuntabel, dan memiliki birokrasi yang tulus, yang mana sebagai hasilnya beberapa negara berkembang akan menjadi jauh lebih baik. Hal ini menyiratkan bahwa dengan meningkatnya kualitas pemerintahan, maka hal itu juga akan mengarah pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (Chaudhry et al., 2009).

Tata kelola adalah konsep yang luas dengan kompleksitas yang tinggi pada pilar-pilar utamanya. Kaufmann, (2010) mendefinisikan pemerintahan sebagai seperangkat tradisi dan institusi yang dapat digunakan untuk menjalankan kekuasaan otoritas, dimana ketentuan tata kelola yang baik mengarah terhadap perbaikan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik, tidak adanya terorisme dan kekerasan, perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah yang mahir, mekanisme regulasi yang lebih baik, pengurangan korupsi dan memastikan supremasi hukum yang dapat diakui sebagai kualitas tata kelola yang tinggi. Kerangka kelembagaan terdiri dari aturan dan norma hukum yang membatasi perilaku pembuat kebijakan. Aturan dan norma hukum juga harus menjamin bahwa tindakan pemerintah tidak merusak melainkan mendukung berfungsinya pertumbuhan ekonomi (Abdullah et al., 2009).

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi salah satu indikator seperti pengendalian korupsi nampaknya dalam beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berlawanan, dimana beberapa menunjukkan arah hubungan yang positif (Awan et al., 2018; Oyinlola et al., 2020; Bah & Kpognon, 2020), sementara lainnya menunjukkan hasil yang negatif (Baklouti & Boujelbene, 2015; Chaudhry et al., 2009; Chakravorty, 2019). Hal ini tentunya menjadi perdebatan penting tentang bagaimana hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki dua aliran argumen, yaitu korupsi dapat mendorong atau memperlambat pertumbuhan ekonomi (Shabbir, 2017).

Mempromosikan agenda tata kelola yang baik akan melibatkan keterlibatan dengan berbagai lembaga dalam rangka pengambilan keputusan yang memprioritaskan masalah publik dan mengalokasikan sumber daya yang efisien. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman tentang dampak tata kelola terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menggunakan data panel selama periode 2005 hingga 2018 di negara berkembang OKI. Negara OKI dipilih dengan pertimbangan bahwa norma budaya yang

digunakan yaitu didasarkan pada agama Islam, yang mana tidak mengizinkan penyalahgunaan uang atau jabatan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Adapun negara berkembang yang dipilih yaitu berdasarkan kategori yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas kelembagaan yang tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan model Solow. Kualitas institusi yang lebih baik dapat berkontribusi pada model Solow dengan meningkatkan ketersediaan teknologi. Tata kelola yang buruk, seperti kekerasan politik, terorisme dan korupsi dapat merugikan warga negara secara mental dan fisik dengan cara menurunkan produktivitas mereka. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa tata kelola yang lebih baik dapat menghilangkan kendala fisik dan mental ini dan sebagai hasilnya, produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Selain itu, peningkatan kualitas kelembagaan juga akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi investor (Romer, 2008). Selain itu, Chaudhry et al. (2009), juga mengemukakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, tata kelola yang baik memainkan peran yang efektif dengan bantuan penyediaan sumber daya yang lebih baik dan bermanfaat seperti modal dan tenaga kerja.

Meskipun indikator tata kelola yang lebih berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan tetapi pertumbuhan tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola. Perdebatan tentang korupsi telah difokuskan pada, apakah korupsi memperlambat atau mendorong kegiatan ekonomi. Aliran pertama atau "*grease the wheels of bureaucracy*" menyatakan bahwa suap meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan bertindak sebagai alat untuk menghemat atau mempercepat uang. Leys tahun 1970 berpendapat bahwa pembayaran sampingan kecil kepada pengurus kantor publik dapat membantu dalam mengurangi hambatan birokrasi dan dengan demikian mendorong kegiatan ekonomi. Aliran kedua "*sand the wheels of bureaucracy*" menegaskan bahwa korupsi dapat berakibat fatal bagi kegiatan ekonomi karena tidak hanya membuat prosedur birokrasi menjadi lamban, mahal, dan tidak efisien tetapi juga mengalihkan sumber daya ke kegiatan yang tidak produktif. Selain itu, korupsi semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang memiliki institusi yang lemah seperti demokrasi, stabilitas politik dan pemerintahan (Shabbir, 2017).

Bank Dunia memastikan bahwa korupsi dan penipuan adalah rintangan luar biasa bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Secara eksplisit, korupsi memperlambat proses pembangunan dengan mendistorsi supremasi hukum dan merusak landasan kelembagaan yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi (Chaudhry et al., 2009). Todaro dan Smith (2006), menyatakan bahwa perbaikan tata kelola secara umum dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan, oleh karenanya kinerja lembaga negara memainkan peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu negara (Shabbir, 2017).

H<sub>1a</sub>: Pengendalian korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang OKI.

Perubahan besar pada pemerintah dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika pemerintahan yang baru dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi investor lokal dan asing dengan cara mengurangi risiko negara dan menawarkan kebijakan yang sehat dan konsisten. Lingkungan politik yang stabil di negara tersebut akan meningkatkan modal manusia serta akumulasi modal fisik, dan dengan demikian mendorong proses pertumbuhan (Younis et al., 2008). Bah dan Kpognon (2020) dan Awan et al. (2018) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan yang positif antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

H<sub>1b</sub>: Stabilitas politik berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang OKI.

Suara dan akuntabilitas menggambarkan partisipasi publik dalam pemerintahan. Terdapat tiga aliran pemikiran utama dalam literatur tentang bagaimana demokrasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sirowy & Inkeles, 1990), yaitu: 1) perspektif konflik berteori bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai oleh rezim politik otoriter karena implementasi kebijakan yang berhasil untuk reformasi, sulit dilakukan di bawah sistem politik yang demokratis; 2) perspektif kompatibilitas menyoroti pentingnya demokrasi dan kebebasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, dimana demokrasi dan kebebasan politik adalah prasyarat untuk penegakan kontrak yang tepat, pengamanan hukum dan ketertiban, dan perluasan pasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat; 3) perspektif skeptis berfokus pada bagaimana beberapa andalan demokrasi seperti sistem partai politik, budaya politik dan penggunaan sumber daya di sektor industri memiliki pengaruh independen

terhadap pertumbuhan ekonomi (Feng, 1997). Terlepas dari berbagai pandangan teori yang berbeda, beberapa penelitian empiris telah menunjukkan adanya hubungan yang positif antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi ((Baklouti & Boujelbene, 2015; Thach et al., 2017; Bah & Kpognon, 2020).

H<sub>1c</sub>: Suara dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang OKI.

Supremasi hukum merupakan lembaga penting yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi karena aturan hukum memastikan keamanan pribadi, hak milik, penegakan kontrak yang tidak bias, dan pengendalian korupsi. Todaro dan Smith (2012) menyatakan bahwa institusi yang baik seperti supremasi hukum dapat mengarah pada pertumbuhan dan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bah dan Kpognon (2020), dimana mereka menemukan bahwa supremasi hukum memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H<sub>1d</sub>: Supremasi hukum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang OKI.

Efektivitas pemerintah meliputi kualitas pelayanan pemerintah, perumusan kebijakan yang kompeten dan kemampuannya dalam implementasi kebijakan yang diinginkan. Selain itu, kualitas regulasi juga merupakan indikator tata kelola pelengkap untuk efektivitas pemerintah, yang mana hal itu menggambarkan kapasitas pemerintah untuk mengambil keputusan kebijakan yang efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor swasta (Kaufmann et al., 2010). Argumen ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Olaoye et al., (2020), dan Bah dan Kpognon (2020), yang menemukan hubungan yang positif antara efektivitas pemerintah, dan supremasi hukum terhadap pertumbuhan ekonomi.

H<sub>1e</sub>: Efektivitas pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang OKI.

H<sub>1f</sub>: Kualitas regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang OKI.

### **Hubungan Tata Kelola dan Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indikator penting untuk mengukur pencapaian dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dimana hal ini dimaksudkan bahwa orang dapat membangun akses untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan pendidikan dan sebagainya (Wibowo, 2020). Akses tersebut tentunya juga harus didorong oleh sistem pemerintahan yang baik agar indikator pembangunan seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata, serta tingkat kesehatan yang tinggi dapat tercapai. Pemerintah yang baik mengindikasikan pemerintahan yang jujur, demokratis, dan memiliki sistem kelembagaan yang baik.

Todaro dan Smith (2006), menyatakan bahwa korupsi dapat menimpa penduduk miskin secara tidak proporsional dan menjadi penghalang utama bagi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintahan yang jujur sangat ditekankan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pendapatan yang lebih tinggi. Akçay (2006), menyatakan bahwa korupsi termasuk ke dalam masalah besar dan berdampak terhadap peningkatan sosial ekonomi dan secara umum juga terhadap indeks pembangunan manusia di negara berkembang. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah berada di garis depan dari konsensus internasional yang telah berkembang, dan menyatakan bahwa hubungan antara tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan.

Indeks pembangunan manusia terdiri dari tiga indikator penting yaitu: 1) kesehatan; 2) tingkat pendidikan; 3) ekonomi. Pengukuran tersebut terbentuk oleh tiga dimensi dasar seperti: 1) kesehatan dan lamanya hidup; 2) pengetahuan; 3) standar hidup layak. Unsur-unsur tersebut saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa berdiri sendiri. Adapun faktor lain yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia diantaranya pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Fajerin, 2018).

H<sub>2a</sub>: Pengendalian korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia di negara berkembang OKI.

H<sub>2b</sub>: Stabilitas politik berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia di negara berkembang OKI.

H<sub>2c</sub>: Suara dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia di negara berkembang OKI.

H<sub>2d</sub>: Supremasi hukum berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia di negara berkembang OKI.

H<sub>2e</sub>: Efektivitas pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia di negara berkembang OKI.

H<sub>2f</sub>: Kualitas regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia di negara berkembang OKI.

### Tata Kelola Menurut Perspektif Islam

Nilai akuntabilitas dan demokrasi sejalan dengan ajaran agama Islam bahwa orang dapat bermusyawarah bersama-sama dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan (Ali Imran [3]: 159), misalnya adanya perbedaan pendapat terkait suatu kebijakan dan kemudian mengkritik dengan cara melakukan aksi demonstrasi (Mutaqin & Ahmad, 2019). Selain itu, ajaran Islam juga memberikan kebebasan pada pemeluknya untuk berpendapat dengan cara yang baik (Al-Baqarah [2]: 83), seperti dalam hal menyampaikan kebenaran dihadapan pemimpin yang melakukan kesalahan (HR. Abu Dawud) (Wibisono, 2021).

Kekerasan dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan asalkan dalam konteks menanggapi serangan dari pihak lain (Al-Baqarah [2]: 192). Apabila pihak lawan menginginkan berdamai, maka juga harus ditanggapi dengan damai (QS. Al-Anfal [8]: 61). Aksi kekerasan yang terjadi di negara Muslim dan dilatarbelakangi oleh politik dan ekonomi, tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena membunuh satu orang tanpa kebenaran sama seperti membunuh semua manusia (QS. Al-Maidah [5]: 32) (Wahid, 1998).

Ajaran Islam menyatakan bahwa pemimpin negara diharapkan mampu menjalankan kebijakan dengan cara yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (QS. Al-Anbiya [21]: 73). Ajaran Islam juga menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat memaksa rakyatnya melalui penegakan hukum dan sistem regulasi yang baik dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, Islam sangat menentang adanya tindak korupsi, karena hasil korupsi termasuk ke dalam kategori harta yang haram (Wibowo, 2020).

### METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2017). Data yang digunakan adalah data panel tahunan dari tahun 2005 hingga 2018 di negara berkembang yang termasuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sampel dipilih berdasarkan: 1) negara tergabung dalam OKI; 2) negara tersebut termasuk dalam kategori negara berkembang (*upper middle income*) pada tahun 2018; 3) data tersedia untuk semua variabel. Negara-negara yang terpilih terdiri dari 10 negara yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Negara Berkembang OKI**

No.	Negara	No.	Negara	No.	Negara	No.	Negara
1.	Azerbaijan	4.	Indonesia	7.	Guyana	10.	Suriname
2.	Algeria	5.	Iraq	8.	Kazakhstan	11.	Gabon
3.	Albania	6.	Malaysia	9.	Lebanon	12.	Libya

Sumber: Olahan penulis, 2021.

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel Dependen		Keterangan	Sumber
Pertumbuhan Ekonomi	GDP per kapita yang dihitung dari total produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk (konstan 2010).		<i>World Bank</i>

Pembangunan Manusia	<i>Human Development Index (HDI)</i> yaitu indeks gabungan yang mengukur pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar perkembangan manusia seperti umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.	UNDP
<b>Variabel Independen</b>		
Pengendalian Korupsi	Mencerminkan persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik dijalankan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk korupsi kecil dan besar, serta penangkapan negara oleh elit dan kepentingan pribadi.	WGI
Stabilitas Politik	Mengukur persepsi kemungkinan ketidakstabilan politik dan/atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme.	WGI
Suara dan Akuntabilitas	Mencerminkan persepsi sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahannya, serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan media yang bebas.	WGI
Supremasi Hukum	Mencerminkan persepsi sejauh mana agen memiliki kepercayaan dan mematuhi aturan masyarakat, dan khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan.	WGI
Efektivitas Pemerintah	Mencerminkan persepsi kualitas pelayanan publik, kualitas pegawai negeri dan derajat kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.	WGI
Kualitas Regulasi	Mencerminkan persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang baik, yang memungkinkan dan mendorong pembangunan sektor swasta.	WGI

Sumber: Olahan penulis, 2021.

Penelitian ini menggunakan regresi data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Adapun regresi data panel terdiri dari *pooled least square (PLS)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)*. Adapun persamaan model yang digunakan sebagai berikut:

Persamaan model tata kelola terhadap pertumbuhan ekonomi:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 CC_{it} + \beta_2 PS_{it} + \beta_3 VA_{it} + \beta_4 RL_{it} + \beta_5 GE_{it} + \beta_6 RQ_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan model tata kelola terhadap pembangunan manusia:

$$HDI_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 CC_{it} + \beta_2 PS_{it} + \beta_3 VA_{it} + \beta_4 RL_{it} + \beta_5 GE_{it} + \beta_6 RQ_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:  $Y$ : GDP per kapita;  $HDI$ : indeks pembangunan manusia;  $CC$ : pengendalian korupsi;  $PS$ : stabilitas politik;  $VA$ : suara dan akuntabilitas;  $RL$ : supremasi hukum;  $GE$ : efektivitas pemerintahan;  $RQ$ : kualitas regulasi;  $i$ : banyaknya negara;  $t$ : banyaknya tahun;  $\beta_{0i}$ : koefisien intersep;  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ : koefisien slope;  $\varepsilon$ : error atau kesalahan.

Adapun pengujian model terbaik untuk memilih antara PLS, FEM dan REM yaitu dilakukan dengan cara:

- 1) Uji Chow  
 $H_0$ : *pooled least square (PLS)*  
 $H_1$ : *fixed effect model (FEM)*
- 2) Uji Hausman  
 $H_0$ : *random effect model (REM)*  
 $H_1$ : *fixed effect model (FEM)*
- 3) Uji LM BP  
 $H_0$ : *pooled least square (PLS)*  
 $H_1$ : *random effect model (REM)*

## HASIL

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dimana pada Tabel 3 akan menampilkan statistik deskriptif dari berbagai variabel yang digunakan, sedangkan pada Tabel 4 akan menampilkan hasil regresi dari ketiga metode yang digunakan.

**Tabel 3. Statistika Deskriptif**

Variabel	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Standar Deviasi
<b>Y</b>	2462,344	12120,083	6494,440	2621,821
<b>HDI</b>	0,619	0,817	0,716	0,049
<b>VA</b>	-1,983	0,606	-0,596	0,650
<b>PS</b>	-2,827	0,833	-0,607	0,902
<b>GE</b>	-1,892	1,267	-0,425	0,624
<b>RQ</b>	-2,285	0,838	-0,500	0,617
<b>RL</b>	-1,838	0,623	-0,629	0,519
<b>CC</b>	-1,627	0,411	-0,726	0,443

Sumber: Olahan penulis, 2021.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel Y memiliki nilai antara 2462,34 hingga 12120,08, variabel HDI sebesar 0,619 hingga 0,817, variabel VA sebesar -1,983 hingga 0,606, variabel PS sebesar -2,827 hingga 0,833, variabel GE sebesar -1,892 hingga 1,267, variabel RQ sebesar -2,285 hingga 0,838, variabel RL sebesar -1,838 hingga 0,623, serta variabel CC sebesar -1,627 hingga 0,411. Secara umum dapat dikatakan bahwa rata-rata untuk seluruh variabel tata kelola pemerintahan masih bernilai negatif, sehingga hal ini mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang masih rendah di negara berembang OKI. Nilai tata kelola pemerintahan berkisar antara -2,5 sampai +2,5, dimana semakin tinggi nilainya maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan di negara tersebut.

**Tabel 4. Hasil Pengujian**

Variabel	Model 1: Dependen: Y			Model 2: Dependen: HDI		
	PLS	FEM	REM	PLS	FEM	REM
<b>VA</b>	-2588.25*** (8.831)	-436.22 (-0.952)	-834.93** (-1.991)	-0.040*** (-6.453)	0.005 (0.414)	-0.006 (-0.628)
<b>PS</b>	216.34 (0.849)	414.82** (2.072)	430.65** (2.194)	0.005 (0.854)	0.007 (1.488)	0.006 (1.284)
<b>GE</b>	-2765.16*** (-3.502)	27.584 (0.057)	-165.54 (-0.348)	0.024 (1.418)	0.020* (1.675)	0.018 (1.603)
<b>RQ</b>	-207.27 (-0.417)	1188.45*** (2.622)	1031.08** (2.344)	0.022** (2.083)	-0.020* (-1.783)	-0.016 (-1.558)
<b>RL</b>	7152.63*** (6.545)	2564.54*** (3.446)	2666.14*** (3.623)	0.008 (0.365)	0.067*** (3.714)	0.063*** (3.539)
<b>CC</b>	-1133.70 (-1.167)	-518.96 (-0.888)	-551.05 (-0.951)	0.004 (0.178)	0.004 (0.279)	0.001 (0.081)
<b>Adjusted R<sup>2</sup></b>	0.531	0.912	0.439	0.394	0.852	0.304
<b>F-statistic</b>	32.573***	102.801***	22.773***	19.062***	57.516***	13.144***
<b>Uji Chow</b>	292.817*** (Cross-section Chi-square)			248.749*** (Cross-section Chi-square)		
<b>Uji Hausman</b>	7.766 (Cross-section random)			6.589 (Cross-section random)		
<b>Uji LM</b>	223.238*** (Breusch-Pagan LM)			400.538*** (Breusch-Pagan LM)		

Ket: \*p<0.10; \*\*p<0.05; \*\*\*p<0.01

Sumber: Olahan penulis, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian menunjukkan bahwa metode terbaik yaitu memilih *random effect model* baik pada model pertumbuhan ekonomi maupun indeks pembangunan manusia, dimana hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas Breusch-Pagan LM < 0,05 (H<sub>a</sub> diterima). Pada model pertumbuhan ekonomi

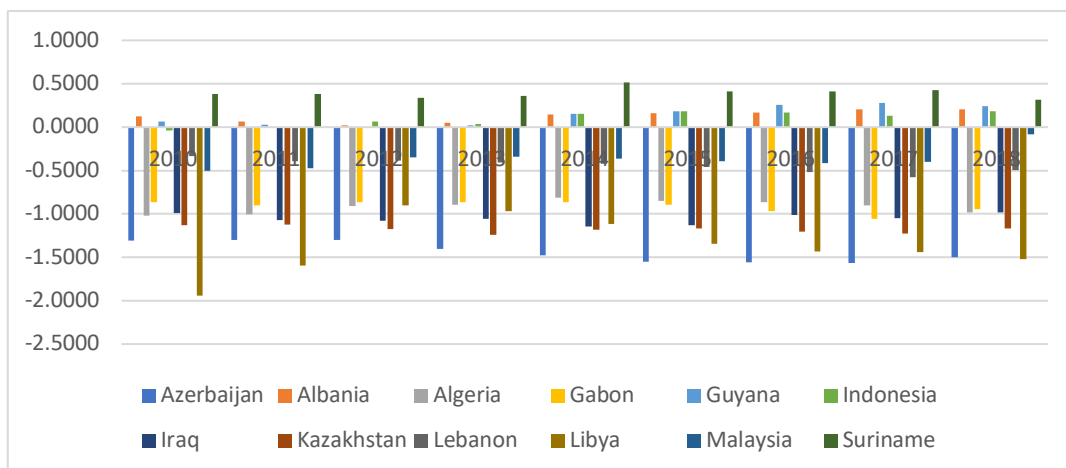
nilai adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan angka 0,506, sehingga dapat diartikan bahwa variabel tata kelola pemerintahan yang baik mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 50,6%, dan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sementara pada model indeks pembangunan manusia nilai adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan angka 0,387, dan dapat diartikan bahwa variabel tata kelola pemerintahan yang baik mampu menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia sebesar 38,7%, dan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

## PEMBAHASAN

### Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa hanya variabel suara dan akuntabilitas (VA), stabilitas politik (PS), kualitas regulasi (RQ) dan aturan hukum (RL) yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 negara berkembang OKI. Variabel VA menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin demokratis suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun (dan sebaliknya). Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shabbir (2017), Baklouti dan Boujelbene (2015), Thach, Duong dan Oanh (2017), dan Bah dan Kpognon (2020) yang menemukan hubungan positif signifikan diantara keduanya. Hasil sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai oleh rezim politik otoriter karena implementasi kebijakan yang berhasil untuk reformasi, sulit dilakukan di bawah sistem politik yang demokratis (Sirowy & Inkeles, 1990).

**Grafik 1. Perkembangan Nilai Suara dan Akuntabilitas di 12 Negara Berkembang OKI**



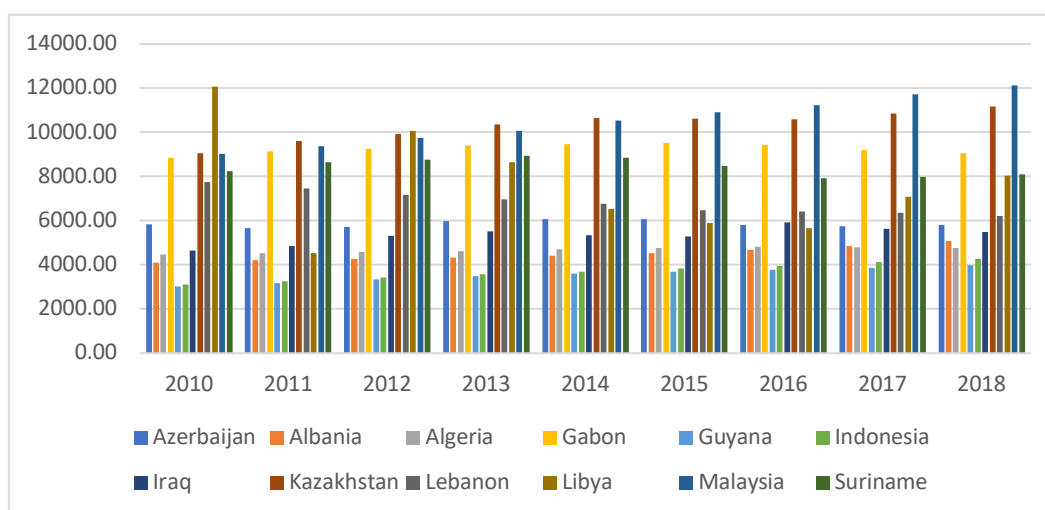
Sumber: Olahan penulis, 2021.

Berdasarkan Grafik 1 diketahui bahwa perkembangan untuk variabel suara dan akuntabilitas di 12 negara berkembang OKI masih sangat rendah, dimana sebagian besar negara memiliki nilai VA yang negatif. Selain itu, dalam beberapa tahun, masih banyak negara yang justru nilai suara dan akuntabilitasnya semakin menurun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara-negara ini masih dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter, meskipun sebagian besar mereka telah menyatakan bahwa negaranya menerapkan pemerintahan yang demokratis. Pernyataan ini juga didukung oleh beberapa fakta seperti pada tahun 2017 presiden Azerbaijan mengangkat istrinya sebagai wakil presiden, yang mana ini menandakan sistem demokrasi yang masih lemah. Selain itu, presiden Azerbaijan juga dianggap otoriter karena menggunakan kekerasan terhadap rakyat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Peristiwa lain terjadi tahun 2019, dimana rakyat Algeria melakukan aksi unjuk rasa terhadap pemerintahan dan menginginkan perubahan politik yang cepat, karena mereka sudah merasa muak dengan kekuasaan otoriter, serta tidak efektifnya politik dan ekonomi yang berlangsung selama beberapa dekade. Pada tahun yang sama pula, Kazakhstan melakukan aksi penangkapan terhadap berbagai demonstran yang dianggap anti pemerintah. Beberapa kejadian ini telah menjadi bukti bahwa negara-negara ini masih mengalami rezim otoriter. Meskipun begitu, hal ini ternyata memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan pendapatan per kapita di sebagian besar negara yang ditunjukkan oleh Grafik 2.



**Grafik 2. Perkembangan Pendapatan Perkapita di 12 Negara Berkembang OKI**



Sumber: Olahan penulis, 2021.

Meskipun terdapat negara yang mengalami penurunan pendapatan perkapita, akan tetapi sebagian besar negara memiliki tren pertumbuhan yang semakin naik dari tahun ke tahun, meskipun sempat dalam beberapa titik mengalami penurunan. Hal ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang OKI ternyata mampu diraih di bawah pemerintahan yang otoriter. Selain itu, ajaran Islam juga memperbolehkan pemerintahan yang bersifat memaksa selama pemerintahan tersebut diterapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, selain dalam konteks mensejahterakan rakyat maka pemerintahan yang otoriter tidak disarankan, terutama untuk negara-negara yang bertujuan untuk menguntungkan elit penguasa.

Variabel stabilitas politik (PS) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awan et al., (2018), dan Bah dan Kpogon (2020) yang menyatakan bahwa ketika suatu negara memiliki stabilitas politik yang tinggi, maka hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan argumentasi yang menyatakan bahwa lingkungan politik yang stabil dapat meningkatkan modal manusia serta akumulasi modal fisik dan dengan demikian mendorong proses pertumbuhan (Younis et al., 2008). Stabilitas politik juga terkait dengan sistem pemerintahan di negara tersebut, negara yang demokratis biasanya lebih cenderung untuk banyak melakukan aksi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang relevan dan menyimpang, sehingga pemerintahan yang otoriter dalam hal ini memang dianggap lebih bisa menertibkan masyarakat dibandingkan dengan yang demokratis. Islam memperbolehkan pemerintahan yang bersifat memaksa selama hal itu untuk tujuan yang baik, dan sangat menentang apabila di dalam sistem ini justru terjadi aksi kekerasan dan saling membunuh manusia satu dengan yang lain.

Variabel efektivitas pemerintah (GE) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awan et al., (2018), Bah dan Kpogon (2020), dan Olaoye et al., (2020) yang menemukan adanya pengaruh antara efektivitas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Nilai rata-rata untuk variabel efektivitas pemerintah dalam sampel masih sangat rendah yaitu -0,425, yang artinya kesesuaian antara perumusan kebijakan dan implementasinya masih rendah. Ketika kebijakan pemerintah belum efektif, hal ini tentunya akan mengganggu roda perekonomian yang bisa berdampak pada pendapatan nasional yang rendah dan selanjutnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa pemimpin negara diharapkan mampu menjalankan kebijakan dengan cara yang efektif, sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya.

Variabel kualitas regulasi (RQ) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bah dan Kpogon (2020), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas regulasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Kualitas regulasi mencerminkan kapasitas pemerintah untuk mengambil keputusan kebijakan yang efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor swasta (Kaufmann et al., 2010). Hal ini bisa diartikan bahwa ketika kualitas regulasi baik, memungkinkan minat para investor untuk menanamkan modalnya, dan kemudian mendorong penyerapan tenaga kerja, serta

meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan yang tinggi, pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Islam juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan sistem regulasi yang baik dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Variabel aturan hukum (RL) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bah dan Kpognon (2020), yang menyatakan bahwa semakin baik aturan hukum (terpercaya), maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Todaro dan Smith (2006), bahwa institusi yang baik seperti supremasi hukum dapat mengarah pada pertumbuhan dan pendapatan yang lebih tinggi. Ketika pemerintah memastikan keamanan pribadi, hak milik, penegakan kontrak yang tidak bias, dan pengendalian korupsi maka hal itu akan mendorong persaingan bisnis yang sehat, dan memungkinkan banyak pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Variabel pengendalian korupsi (CC) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awan et al., (2018), dan Bah dan Kpognon (2020). Meskipun tidak berpengaruh, akan tetapi arah hubungan yang dihasilkan yaitu negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan negara yang korup justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tampaknya hasil penelitian ini mendukung teori "*grease the wheels of bureaucracy*" yang menyatakan bahwa pembayaran sampingan kecil kepada pengurus kantor publik dapat membantu dalam mengurangi hambatan birokrasi dan dengan demikian mendorong kegiatan ekonomi. Selain itu, negara berkembang memang sangat rentan terhadap suap, dan meskipun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi Islam sangat menentang hasil korupsi, karena hasil korupsi merupakan harta yang haram. Nampaknya hasil ini juga sejalan dengan pemerintahan di berbagai negara yang masih dianggap otoriter.

### **Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Berdasarkan Tabel 4 hanya variabel aturan hukum (RL) yang berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Keser dan Gökmen (2017), dan Chaudhry et al., (2009), yang menyatakan bahwa semakin suatu aturan hukum dapat dipercaya, maka hal itu akan mendorong pembangunan manusia yang lebih baik. Indeks pembangunan memiliki beberapa indikator yang salah satunya yaitu bidang ekonomi, yang mana ketika aturan hukum ditegakkan dengan baik maka yang terjadi adalah ekonomi lebih berkembang karena negara dapat menjamin berbagai hak milik, kontrak, serta kemungkinan terjadinya kejahatan dan kekerasan. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Islam menekankan pentingnya aturan hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, variabel lain seperti suara dan akuntabilitas (VA), stabilitas politik (PS), efektivitas pemerintah (GE), kualitas regulasi (RQ), dan pengendalian korupsi (CC) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 10 negara OKI. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad dan Saleem (2014), yang tidak menemukan hubungan antara kualitas regulasi terhadap indeks pembangunan manusia. Selain itu, Keser dan Gökmen (2017), juga tidak menemukan hubungan antara stabilitas politik dan pengendalian korupsi terhadap indeks pembangunan manusia. Suara dan akuntabilitas, dan kualitas regulasi menunjukkan arah hubungan yang negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini bisa dikarenakan negara berkembang sering dikaitkan dengan sumber daya manusia yang rendah, sehingga ketika keadaan negara sudah demokratis dan kualitas regulasi sudah baik, banyak dari mereka yang enggan untuk mencapai kesehatan yang baik, serta pendidikan yang layak. Hal ini tentu memberikan implikasi kebijakan terkait dengan pentingnya pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat kecil untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Variabel stabilitas politik, efektivitas pemerintah, dan pengendalian korupsi memberikan hasil yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan pentingnya pemerintah untuk semakin meningkatkan efektivitasnya, memiliki lingkungan politik yang stabil, serta terhindar dari praktik korupsi yang dapat menghambat pembangunan. Selain itu, korupsi dapat menimpa penduduk miskin secara tidak proporsional dan menjadi penghalang utama bagi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan (Todaro & Smith, 2006). Jika pemerintah terus berupaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bukan hal yang mustahil untuk mencapai suatu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga diharuskan untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah dirumuskan dapat berjalan sesuai dengan rencana, karena efektivitas pemerintah inilah yang akan mendorong naiknya indeks pembangunan manusia.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model pertumbuhan ekonomi, variabel stabilitas politik, kualitas regulasi dan aturan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara OKI. Oleh karena itu peningkatan pada ketiga variabel tata kelola ini sangat ditekankan. Selain itu, suara dan akuntabilitas menunjukkan hasil yang negatif, yang mana untuk mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang otoriter bisa menjadi solusi bagi masalah tersebut, selama dalam konteks untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya pemerintah dalam menjaga praktik korupsi, meskipun hasil menunjukkan arah yang negatif akan tetapi korupsi dapat berakibat fatal bagi kegiatan ekonomi karena tidak hanya membuat prosedur birokrasi menjadi lamban, mahal, dan tidak efisien tetapi juga mengalihkan sumber daya ke kegiatan yang tidak produktif.

Pada model indeks pembangunan manusia, hanya variabel aturan hukum yang berpengaruh positif signifikan, sementara variabel lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap HDI. Hal ini mengindikasikan pentingnya pemerintah dalam menjaga aturan hukum yang mengikat, yang mampu memastikan hak milik, dan kontrak agar proses kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Ketika pemerintah dapat menjamin rakyatnya dari adanya tindak kekerasan, maka sangat dimungkinkan masyarakat mampu untuk mengenyam pendidikan yang lebih layak dan kesehatan yang lebih tinggi. Penelitian ini juga merekomendasikan pemerintah agar mengefektivaskan kebijakannya agar lebih tepat sasaran dan selanjutnya meningkatkan indeks pembangunan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H., Habibullah, M. S., & Baharumshah, A. Z. (2009). The effect of fiscal variables on economic growth in Asian economies: A dynamic panel data analysis. *International Journal of Business and Management*, 4(1), 56–69.
- Ahmad, Z., & Saleem, A. (2014). Impact of governance on human development. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS)*, 8(3), 612–628.
- Akçay, S. (2006). Corruption and human development. *Cato J.*, 26, 29.
- Awan, R. U., Akhtar, T., Rahim, S., Sher, F., & Cheema, A. R. (2018). Governance, corruption and economic growth: A panel data analysis of selected SAARC countries. *Pakistan Economic and Social Review*, 56(1), 1–20.
- Bah, M., & Kpognon, K. (2020). Public investment and economic growth in ECOWAS countries: Does governance Matter? *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 1–14.
- Baklouti, N., & Boujelbene, Y. (2015). Exploring the Relationship between Democracy, Corruption and Economic Growth in MENA countries. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*, 11(3).
- Chakravorty, N. N. (2019). How Does Corruption Affect Economic Growth? An Econometric Analysis. *Journal of Leadership, Accountability & Ethics*, 16(4).
- Chaudhry, I. S., Malik, S., Khan, K. N., & Rasool, S. (2009). Factors affecting good governance in Pakistan: An empirical analysis. *European Journal of Scientific Research*, 35(3), 337–346.
- Fajar, M., & Azhar, Z. (2019). Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 681–690.
- Fajerin, M. (2018). Tata Kelola Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2016. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(3).
- Feng, Y. (1997). Democracy, political stability and economic growth. *British Journal of Political Science*, 27(3), 391–418.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *World Bank Policy Research Working Paper*, 5430.
- Keser, A., & Gökmen, Y. (2017). Governance and human development: the impacts of governance indicators on human development. *Nation*, 8(1).
- Mutaqin, Z., & Ahmad, R. (2019). Moderatisme Hukum sebagai Fondasi Masyarakat Islam. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(2), 272–310.
- Olaoye, I. J., Ayinde, O. E., Ajewole, O. O., & Adebisi, L. O. (2020). The role of research and development (R&D)

- expenditure and governance on economic growth in selected African countries. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 1–8.
- Oyinlola, M. A., Adedeji, A. A., Bolarinwa, M. O., & Olabisi, N. (2020). Governance, domestic resource mobilization, and inclusive growth in sub-Saharan Africa. *Economic Analysis and Policy*, 65, 68–88.
- Pradhan, R. P. (2011). Good governance and human development: evidence form Indian states. *Journal of Social and Development Sciences*, 1(1), 1–8.
- Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.
- Romer, C. D. (2008). Business cycles. *The Concise Encyclopedia of Economics*, 26, 2010.
- Samarasinghe, T. (2018). *Impact of governance on economic growth*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan. *Pengembangan-Keahlian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Shabbir, G. (2017). CORRUPTION, DEMOCRACY AND ECONOMIC GROWTH. *Pakistan Economic and Social Review*, 55(1), 127–145.
- Sirowy, L., & Inkeles, A. (1990). The effects of democracy on economic growth and inequality: A review. *Studies in Comparative International Development*, 25(1), 126–157.
- Thach, N. N., Duong, M. B., & Oanh, T. T. K. (2017). Effects of corruption on economic growth-empirical study of Asia countries. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 7, 791–804.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan*. Erlangga. Jakarta.
- Turner, K. (2011). The Importance of Good Governance in Achieving Economic Growth for Developing Nations: An Analysis of Sub-Saharan Africa. *Bryant Economic Research Paper*, 4(4).
- Wahid, K. H. A. (1998). *Islam tanpa kekerasan*. LKiS.
- Waluyo, J. (2012). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan: 1 Suatu Studi Lintas Negara. *Buletin Ekonomi*.
- Wibisono, M. Y. (2021). *Agama dan Resolusi Konflik*. Lekkas dan FKP2B Press.
- Wibowo, M. G. (2020). Good Public Governance in Islamic Perspective: An Analysis on the World Governance Indicator in OIC Member Countries. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 3(1), 51–66.
- Younis, M., Lin, X. X., Sharahili, Y., & Selvarathinam, S. (2008). Political stability and economic growth in Asia. *American Journal of Applied Sciences*, 5(3), 203–208.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).